

Bupati Pimpin Rapat Evaluasi

Tindaklanjut Temuan BPK

BENGKAYANG- Mempercepat penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI Perwakilan Pontianak atas laporan keuangan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2009, Bupati Bengkayang memimpin langsung rapat evaluasi perkembangan tindak lanjut. Demikian disampaikan Humas Setda Bengkayang, kepada Pontianak Post, dalam relisnya.

Hadir dalam rapat evaluasi tersebut Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, para staf ahli bupati, sekda, Kristianus Anyim, Kepala Inspektorat Bengkayang, kepala DPKKAD dan semua kepala SKPD, para camat se Kabupaten Bengkayang. Suryadman Gidot dalam arahnya meminta kepada para kepala SKPD untuk memberikan perhatian serius terhadap hasil temuan tersebut dan segera menyelesaikannya baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat materil.

Diakui Gidot, dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, sebenarnya pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menjalankan kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan dengan membuka kelas khusus diploma 1 akuntansi melalui kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sekaligus, sambung mantan wakil bupati ini, diklat teknis

◆ Ke Halaman 31 kolom 1

Bupati Pimpin Rapat Evaluasi

✓ *Sambungan dari halaman 25*

kepada semua kepala SKPD selaku pengguna anggaran berkaitan dengan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah. "Dengan terobosan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang dimasa yang akan datang," kata dia dalam

arahannya. Selanjutnya bupati mengingatkan arti pentingnya inspektorat daerah selaku perpanjangan tangan kepala daerah dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah.

"Jika inspektorat dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dan sekaligus melaksanakannya dengan

baik maka dapat diyakini kinerja pengelolaan keuangan daerah dimasa yang akan datang akan lebih baik. Sebab, tanpa melaksanakan fungsi kontrol maka pelaksanaan fungsi manajemen lainnya tidak akan berjalan dengan baik pula. Bupati menghimbau kepada dinas yang mengelola keuangan dan kekayaan daerah dan para kepala SKPD

lainnya, untuk memahami ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

"Terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan agar kekeliruan, ketidakcermatan dapat diperkecil dan bahkan dihindari, sehingga raport pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang akan lebih baik," kata Gidot. (zrf)